

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pilihan Politik Masyarakat Kecamatan Tanjung Tiram pada tahun 2019

Negara yang baik adalah Negara yang mempunyai sistem politik yang ideal. Politik sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia harus mendapat tuntutan pula dari agama Islam. Itulah sebabnya Islam tidak bisa dipisahkan dari negara sebagai objek politik dan negara tidak bisa lepas dari tuntutan Islam. Dengan demikian sekularisme dalam politik kenegaraan tidak mungkin diterima dalam Islam karena tidak sesuai dengan fitrah Islam sebagai keutuhan dan kebulatan ajaran serta tuntunan asasi bagi kehidupan manusia.

Negara tidak akan pernah lepas dari politik. Baik politik, sistem politik, politik kenegaraan, kekuasaan atau pemerintahan adalah ungkapan-ungkapan yang menunjukan kepada aturan-aturan dalam bernegara dan bermasyarakat, sumber kekuasaan, pemegang kekuasaan, tanggung jawab penguasa dan rakyat, territorial hukum dan wilayah serta kedaulatan.

Para sarjana ilmu politik pada pertemuan di Paris tahun 1948 berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah “keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu”. Definisi lain yang juga serupa adalah “ilmu adalah pengetahuan yang tersusun, sedangkan pengetahuan adalah pengamatan yang disusun secara sistematis”.

Secara garis besar dalam perkembangan ilmu politik dapat dibagi menjadi dua yaitu Politik: Sebagai suatu kemahiran dan sebagai Ilmu Sebagai kemahiran berarti adalah: Kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam berpolitik. Sedangkan sebagai Ilmu : Suatu Studi Yang mempelajari negara/pemerintah dan gejala-gejala politik dalam kehidupan masyarakat sebagai objeknya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dalam kehidupan masyarakat, dan tergolong dalam ilmu sosial.

Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya: “Adalah Bani Israil, mereka diurus urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang

nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah”. Teranglah bahwa politik atau siyasah itu makna awalnya adalah mengurus urusan masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurus urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran yang nyata (kufran bawahan) seperti ditegaskan dalam banyak hadiststerkenal. Ini adalah perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Berkaitan dengan persoalan ini Nabi Muhammad SAW bersabda: “Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah (hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namun tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka.” (HR. Al Hakim)¹.

Dengan demikian masyarakat harus punya ilmu dan wawasan dalam luas dalam membentuk sebuah negara dan dalam menentukan pilihan terhdap pemimpin negara, agar kehidupan masyarakat lebih baik dan sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis. Secara umum Wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Selain itu, wawasan menunjukkan kegiatan untuk mengetahui isi serta pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, juga melukiskan cara pandang, cara tinjau, cara lihat, atau tanggap indrawati sedang Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan di gunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Wawasan politik adalah pengetahuan seseorang atau masyarakat tentang politik atau peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

“Arti wawasan politik bagi masyarakat pesisir pantai berbeda-beda, meski mereka memiliki budaya dan suku yang sama. Ada yang memandang politik adalah alat untuk mencapai tujuan kekuasaan ada juga yang memandang politik untuk meluaskan kebermanfaatkan melalui

¹ <https://ms-meureudu.go.id/2019/09/14/islam-politik-dan-pemimpin-yang-terbaik/>

kekuasaan, ada juga yang memandang politik sebagai transaksi untuk menghasilkan suara. Bagi sebagian org politik adalah hal untuk meningkatkan kekayaan pribadi, namu bagi kaum intekektual dan cendikiawan menganggap politik adalah alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya wawasan politik yang kurang namun partisipasi juga cendrung tidak terlalu tinggi, terlihat dari pilihan masyarakat yang tidak berdasarkan program kerja tapi berdasarkan berapa banyak hadiah yang diberikan oleh calon pemimpin.” Ungkap seorang politikus, bapak Fahri Ramzi.

Berdasarkan ungkapan beliau serta fakta dilapangan, bawhwa wawasan masyarakat sangat minin, kurangnya edukasi dari masyarakat itu sendiri maupun tidak adanya sosialisasi dari pemerintah tentang politik yang baik. Kurangnya pengawasan dari KPU dan BAWASLU terhadap partai-partai atau bakal calon. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*.

Selaras dengan wawancara tersebut dalam Al quran surah At Taubah ayah 122 juga menjelaskan bahwa pentingnya menuntut ilmu:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: *Tidak Sepatutnya Orang-Orang Mukmin Pergi Semuanya (Ke Medan Perang). Mengapa Sebagian Dari Setiap Golongan Di Antara Mereka Tidak Pergi (Tinggal Bersama Rasulullah) Untuk Memperdalam Pengetahuan Agama Mereka Dan Memberi Peringatan Kepada Kaumnya Apabila Mereka Telah Kembali, Agar Mereka Dapat Menjaga Dirinya ?*

Pada ayat ini dijelaskan tentang pentingnya pembagian tugas kerja dalam kehidupan bersama dengan penegasan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang sehingga hal yang lainnya terabaikan. Mengapa tidak ada sebagian dari setiap golongan di antara mereka yang pergi untuk bersungguh-sungguh memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan dengan menyebarkan pengetahuan tersebut

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali dari berperang atau tugas apa pun, pengetahuan agama ini penting agar mereka dapat menjaga dirinya dan berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran.

Dalam Surah An-Nisa ayat ke 58 Allah Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam ayat ini mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Mahaagung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

Al-Imam Al Thabari mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah bahwa Allah memerintahkan kepada para pemimpin kaum muslimin untuk menunaikan amanah yang dipikulkan kepadanya, memberikan kepada rakyat akan hak-haknya, jangan pernah mendzolimi mereka sedikitpun. Memberikan keputusan di antara mereka dengan adil. Begitulah hukum Allah yang sudah diturunkan-Nya kepada mereka.²

Kemudian di dalam tafsir M. Quraish Shihab dijelaskan Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan di kembalikan bila tiba saatnya atau bila

² Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc.Ma. Politik islam dalam al-quran (Bekasi, 2023.). hlm 17

diminta oleh pemiliknya. Amanah Adalah lawan dari khianat,. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.

Menurut penulis pilihan politik masyarakat Pesisir Batu Bara tergantung dengan seberapa luas dan terarahnya ilmu pengetahuan masyarakat tersebut, selain itu faktor lain juga mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang politik, seperti pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Masyarakat pesisir Tanjung Tiram juga lebih cenderung mendapat wawasan tentang politik di warung kopi, bercerita sambil minum kopi adalah kebiasaan dari masyarakat pesisir Tanjung Tiram.

Seperti yang di ukapan oleh Ilham pertama *“Kebanyakan masyarakat Pesisir Tanjung Tiram Batu Bara mendapat pengetahuan politiknya di warung kopi, tapi tidak pengetahuan politik yang mendasar, hanya pengetahuan yang luas namun tidak terarah, dan hanya dibicarakan di tahun-tahun pemilu saja, selain dari itu mereka jarang membicarakan tentang politik”*

Dari wawancara bersama Ilham Pratama, penulis dapat menyimpulkan bahwa, pembahasan politik hanya akan dibahas pada saat tahun pemilu saja dan di tempat tempat publik, seperti warung kopi dan lain-lain, namun tidak adanya sosialisasi secara khusus untuk menumbuhkan wawasan politik yang lebih terarah. Masyarakat cukup berpengetahuan akan politik, namun tidak mendasar dan tidak di pelajari secara detail. Minimnya literasi dan kurang keterbukaan pandangan menjadi salah satu faktor kenapa pilihan masyarakat beragam namun tidak terarah. Padahal Allah sudah menjelaskan di Al-quran Najuran untuk menuntut ilmu.

B. Dampak Budaya Melayu Terhadap Pilihan Politik

Etnis sebagai pihak yang memiliki basis massa dengan elite lokal etnis sebagai pengarah mobilisasi suara massa kepada calon yang berasal dari putra kesukuan/daerahnya khususnya yang terjadi pada etnis mayoritas Etnis Melayu. Etnisitas merupakan simbol

identitas yang kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk merebut kekuasaan politik dan ekonomi. Terdapat dua argumen dasar yang melandasi hal ini pertama, setiap pemilihan pemimpin seperti pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan lima tahun sekali, isu tentang asal etnis (geopolitik) kandidat tidak akan terlepas dari kerangka pertarungan politik antar kandidat. Kedua, penguasaan dan akses terhadap aset-aset ekonomi oleh entitas sosial tertentu, juga tidak pernah lepas dari bahan pembicaraan dari para kalangan intelektual sosial dan politikus sampai kepada masyarakat biasa.

Penentuan pemilihan masyarakat banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya baik itu identifikasi partai, isu maupun kandidat parpol yang merupakan akibat dari proses sosialisasi politik. Identifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang berkembang. Pendekatan psikologis merupakan suatu hal yang fenomenal dan menjadi perilaku memilih masyarakat dalam Pilkada, khususnya di kalangan pemilih pemula yang menjadi dasar dalam menentukan sikap politiknya.

Sikap demokratis dalam sistem politik akan lebih efektif jika masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk melakukan perubahan dibandingkan mengambil sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau sering juga disebut golput (golongan putih). Kenyataannya masih banyak masyarakat yang bersikap tidak peduli dengan politik. Mereka kebanyakan lebih memilih untuk apatis terhadap kegiatan pemilu karena mereka kurang simpatik terhadap hal-hal yang terjadi di dunia politik.

Berbeda adalah soal pilihan. Salah satu pilihan yang kerap menunjukkan kita berbeda adalah pilihan politik. Keberbedaan pilihan politik itu adalah sah dan tidak dilarang. Keabsahan berbeda dalam pilihan politik juga terkandung arti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia untuk tidak selalu harus sama dalam memilih. Kesalahan dalam mengartikan keberbedaan pilihan politik menjadi penyebab ketidaksukaan dan kebencian terhadap pemilih

berbeda. Berbeda tidaklah lagi kebhinnekaan, tetapi berbeda adalah ketidaksamaan, sehingga menyikapinya adalah dengan penghadangan terhadap pihak-pihak yang tidak sama dengannya. Pandangan itulah yang dapat dirasakan pada pemilu Tahun 2019 di kecamatan tanjung tiram kabupaten batu bara. Hingga setiap pemilihan wakil rakyat masyarakat selalu berbeda pandangan dan pilihan yang selalu didasari oleh pemberian hadiah dari calon wakil rakyat. Sebuah episode yang telah mencederai pesta demokrasi yang terjadi 5 tahun sekali.

Untuk itu, maka kedewasaan sikap mendesak dilakukan. Kedewasaan dengan mengintrospeksi diri pribadi masing-masing pemilih bahwa pilihan politik lebih dari satu menjadikan pilihannya kepada dua atau lebih pilihan berbeda realitas harus diterima. Dengan kesadaran ini juga, maka keberbedaan adalah bagian dinamika biasa dan tidak harus disikapi dengan tindakan kontraproduktif, tetapi lebih baik menggunakan cara rasionalitas kedewasaan menghadapi keberbedaan tersebut. Melalui kedewasaan sikap demokrasi akan berakar dan berjalan serta bertahan lama, meskipun tidak sama pilihan politiknya. Demokrasi, idealnya, dibangun dengan fondasi partisipasi, kesukarelaan kebebasan memilih dan bukan dengan mobilisasi, keterpaksaan dan ancaman

Secara umum, pilihan politik di masyarakat Melayu pesisir pantai Tanjung Tiram kabupaten Batu Bara terpecah belah atau tidak satu pilihan, mereka terbagi-bagi dalam beberapa pilihan berdasarkan kepercayaan mereka terhadap partai politik yang ada di masyarakat. Hal ini juga terlihat pada saat pemilu 2019, dimana masyarakat yang mayoritas melayu dan Islam namun partai politik yang berlandaskan Islam tidak memiliki kursi di wilayah yang mayoritas Islam. Tidak hanya masalah agama, mayoritas masyarakat yang memiliki suku Melayu pun tidak memilih calon wakil rakyat dari lingkungan tempat tinggalnya sendiri, dikarenakan pilihan masyarakat tidak lagi berdasarkan agama, suku ataupun berdasarkan kebijakan program yang ditawarkan oleh calon wakil rakyat namun juga adanya

praktik money laundry. Partai politik yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan pemilu. Dalam cakupan yang sangat luas, politik uang akan memicu korupsi sebelum pemilihan (untuk mengembalikan modal politik) dan pasca pemilihan (mengembalikan modal atau mengakomodir para penyumbang/donator).

Kekuatan partai berbasis Islam seperti PKS, PPP, dan PBB serta partai berbasis massa seperti PKB dan Wajar bukanlah kekuatan yang lebih besar, padahal mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Pertentangan tersebut tergantung pada konsekuensi dari 5 pemilihan mayoritas yang telah diadakan, yaitu hasil keputusan politik tahun 1995 dimenangkan oleh PNI dengan jumlah suara 8.432.653, keputusan politik tahun 1999 dimenangkan oleh PDI dengan jumlah suara 35.706.618 suara, keputusan politik 2004 dimenangkan oleh Golkar dengan 24.480 suara. Dengan 21.703.137 suara, Partai Demokrat menang dalam pemilu 2009.³ PDIP memenangkan pemilu 2014 dengan 23.681.471 suara, Keputusan politik 2019 dimenangkan oleh PDIP dengan 27.053.961 suara.

Budaya Politik di Indonesia bisa dilihat dari pelaku masyarakatnya. Jadi, pengertiannya yaitu tindakan atau sikap warga negara dalam merespon struktur serta aktivitas politis dalam sebuah wilayah. Adapun mengenai budaya politik ini berasal dari aspek tertentu, seperti adat, pengetahuan serta norma masyarakat. Hasil pemahaman, pembelajaran maupun analisis dalam kurun waktu tertentu oleh masyarakat yang akhirnya membentuk budaya. Sifat budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia sekarang adalah mixed political culture. Selain mempunyai budaya bertipe parokial, juga memegang partisipan.

Menurut para ahli, budaya politik masyarakat Indonesia tidak hanya menganut satu tipe saja. Parokial bisa dilihat dari kurangnya partisipasi warga negara terhadap kegiatan bidang ini. Kurangnya partisipasi ini bisa karena banyak hal. Secara umum, kasus tersebut bisa ditemui

³ Kacung Marjjan. Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Kencana 2010), h.66-72.

pada wilayah masyarakat yang sulit dijangkau, seperti pedalaman gunung, pesisir maupun desa terpencil. Selain itu bisa juga karena faktor lain, seperti ekonomi, rendahnya pendidikan maupun sarana prasarana. Sedangkan budaya politik di Indonesia partisipan bisa dilihat dari aktifnya peran masyarakat yang membuka suara setiap ada aktivitas politik. Apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak rakyat. Berdasarkan buku yang berjudul Mengenal Ilmu Politik (2015) karya Ikhsan Darmawan, terdapat tiga tipe budaya bidang ini. Budaya politik di Indonesia masuk ke dalam tipe yang sudah disebutkan sebelumnya. Tiga tipe tersebut antara lain:

1. Parokial



Parokial mempunyai cakupan daerah terbatas. Jadi, lingkungannya kecil dalam zona daerah. Parokial menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat dalam kegiatan bidang ini rendah.

Biasanya terjadi pada kelompok masyarakat yang tradisional atau berada di wilayah terpencil, sehingga sarana untuk ikut berpartisipasi pun kurang memadai. Parokial ditandai dengan kurang tertariknya warga mengenai masalah politik.

2. Partisipan

Budaya politik di Indonesia partisipan ditandai dengan kesadaran rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan aspek ini. Masyarakat pada partisipan sadar bahwa sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban terkait masalah politik.

Kontribusi aktif yang diberikan memiliki pengaruh terhadap kebijakan politik. Apalagi mengingat masyarakat memang mempunyai peran dalam penetapan kebijakan tersebut, tidak hanya oleh penguasa saja. Partisipan secara umum diterapkan pada wilayah yang sistemnya

menganut demokrasi. Sebab, pada sistem ini, dalam negara pemerintah serta masyarakat memiliki hak dan juga kebebasan setara.

3. Subjek

Terakhir adalah subjek, di mana masyarakat tidak sadar dan kurang peduli mengenai sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Warganya lebih tertarik terhadap hasil dari penyelenggaraannya. Sedangkan terkait proses, keterlibatan dan partisipasi termasuk rendah. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengaruh dari warga terhadap sistem ini sangat kecil. Masyarakat hanya menunggu kebijakan dari penguasa saja, tidak ikut andil didalamnya. Di Indonesia menganut dua jenis budaya yang sering kita temui. Budaya yang berlangsung tergantung dari banyak faktor, namun yang paling dominan adalah lingkungan. Uraian mengenai cirinya sebagai berikut.

a) Parokial

Ciri dari parokial yaitu masyarakat apatis, ruang lingkup sempit dan kecil, pengetahuan warga mengenai aspek ini termasuk kategori sangat rendah, masyarakat tidak memperdulikan bahkan menarik diri dari kawasan politik. Ciri lainnya yaitu masyarakat jarang sekali berhadapan dengan sistem ini, kesadaran warga mengenai kewenangan serta kekuasaan negara sangat rendah. Jadi, intinya budaya politik di Indonesia satu ini membuat rakyatnya kurang aktif berpartisipasi.

b) Partisipan

Ciri-ciri dari partisipan yaitu masyarakat mempunyai kesadaran tinggi untuk aktif berperan terkait bidang ini dan sadar bahwa warga memiliki hak serta tanggung jawab terhadap kehidupan politik. Ciri lainnya adalah rakyat tidak begitu saja menerima situasi yang ada, tapi secara sadar memberikan penilaian terhadap masalah terkait politik. Budaya politik di

Indonesia jenis partisipan ini merupakan yang paling ideal bagi negara demokrasi. Ada beberapa contoh budaya ini di masyarakat Indonesia, yaitu berpartisipasi dalam pemilu bagi yang memenuhi persyaratan ketentuan, ikut serta dalam forum untuk menyampaikan aspirasi serta melakukan unjuk rasa dengan tertib dan damai.

Muhammad Ridwan selaku tokoh melayu mengatakan bahwa *“Budaya dan politik di Masyarakat Tanjung Tiram tidak memberikan dampak atau pengaruh yang besar terhadap pilihan maupun politik masyarakat itu sendiri, karena mereka memilih tidak berdasarkan Budaya, tetapi berdasarkan apa yang mereka ketahui dan mereka lihat dimasyarakat”*.

Aktifnya masyarakat dalam kegiatan bidang ini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan negara, apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi. Jadi, budaya politik di Indonesia diharapkan tetap mampu membuat rakyatnya aktif berperan. Budaya politik di Indonesia diharapkan tetap mampu membuat masyarakatnya aktif berperan, apalagi mengingat sistemnya demokrasi. Tak hanya aktif berperan namun juga mendapatkan pengetahuan tentang politik dan pola pikir yang baru, jika dilihat lebih dalam lagi, budaya Melayu tak terlalu memberikan dampak terhadap pilihan politik masyarakat pesisir Tanjung Tiram, karena yang lebih banyak berdampak adalah wawasan mereka terhadap politik itu sendiri.

Muhammad Ridwan juga menambahkan *“Budaya tidak berdampak banyak terhadap pilihan masyarakat terhadap pemimpin, hanya sebagian kecil yang memilih berdasarkan suku, budaya atau agama mungkin hanya orang-orang yang memiliki iktan keluarga yang melakukan pilihan berdasarkan budaya. Atau mereka yang berada di organisasi yang sama. Lingkungan yang mayoritas bersuku Melayu tidak memberikan dampak yang banyak terhadap pilihan Masyarakat”*

Dari wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa, mayoritas suku maupun agama tidak terlalu berpengaruh terhadap pilihan politik, masyarakat lebih cenderung memilih karena pengetahuan mereka terhadap calon yang ingin mereka pilih. Meskipun pengetahuan mereka terbatas, namun masyarakat cukup yakin akan pilihan yang mereka pilih.

Dalam Al- Quran surah Al Kahfi ayat 84:

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah memberi kedudukan kepadanya di (muka) bumi dan Kami telah memberikan jalan kepadanya (untuk mencapai) segala sesuatu.*

Ayat ini menceritakan tentang memberikan kedudukan kepada Raja Zulqarnain. Pada masa yang sama Allah juga memberikan asbab yang sama untuk mendukung kekuasaannya. Ayat ini menjelaskan bahwa kekuasaan itu memang diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya⁴, tidak hanya rakyat yang memilih tetapi Allah juga ikut andil di dalamnya. Kekuasaan yang diberikan oleh Allah adalah merupakan amanah. Digunakan untuk menyempurnakan pengabdian kepada Allah, seperti mendirikan Sholat, menunaikan zakat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.

Memilih juga tidak hanya didasarkan oleh budaya tapi juga berlandaskan keimanan kepada Allah, memilih pemimpin tidak hanya melihat dari segi ilmu pengetahuannya saja yang dimana itu adalah sebah kewajiban yang di miliki pemimpin, bahwa pemimpin haruslah cerdas dan adil untuk rakyatnya , namun kita juga harus melihat bagaiman ketaqwaan terhadap

⁴ Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc. Ma. H. Muhammad Nuh, MSP. Politik Islam Dalam Al-Qur'an. (Bekasi 2023). Hlm 24

tuhannya, ketika pemimpin takut kepada tuhan, pasti mereka menjalankan manah dengan sebaik mungkin dan menggunakan kekuasaan mereka seadil-adilnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN